

ETIKA SOSIAL QUR'ANIK BAGI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

THE QUR'ANIC SOCIAL ETHICS FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

M. Ied Al Munir

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

m.iedalmunir@uinjambi.ac.id

Mohd. Arifullah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

mohd.arifullah@uinjambi.ac.id

ABSTRAK: *Sustainable Development Goals (SDGs) belum secara baik dipahami dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Kurangnya pemahaman dan penerimaan ini disebabkan oleh berbagai alasan, salah satunya karena SDGs seringkali dipandang sebagai agenda dari luar Indonesia yang belum tentu selaras dan sejalan dengan berbagai nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, diperlukan usaha untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa SDGs adalah selaras dan sejalan dengan berbagai nilai yang ada yang dalam penelitian ini adalah nilai-nilai agama Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang berbentuk studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari literatur cetak dan online serta dianalisis dengan teori hermeneutika. Penelitian ini menemukan bahwa beragam pilar dalam SDGs, yakni pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar pembangunan hukum memiliki semangat yang sejalan dengan berbagai ayat dalam al-Qur'an. Temuan ini penting bagi usaha untuk menyosialisasikan dan mengimplementasikan SDGs dalam kehidupan keseharian masyarakat Indonesia.*

Kata Kunci: *Etika Sosial, al-Qur'an, Sustainable development goals.*

ABSTRACT: *Sustainable Development Goals (SDGs) are not yet well understood and accepted by Indonesian people. This lack of understanding and acceptance is caused by various reasons, one of which is because SDGs are often seen as an agenda from outside Indonesia which is not necessarily in line with the various values that exist in Indonesian society. Therefore, efforts are needed to provide an explanation to the public that the SDGs are in line with various existing values, which in this research are the Islamic religious values held by the majority of Indonesian society. This research uses descriptive qualitative research in the form of a literature study. Data was collected from printed and online literature and analyzed using hermeneutic theory. This research found that the various pillars in the SDGs, namely the social development pillar, the economic development pillar, the environmental development pillar, and the legal development pillar have a spirit that is in line with various verses in the Quran. These findings are important for efforts to socialize and implement SDGs in the daily lives of Indonesian people.*

Keyword: *Social ethics, the Quran, Sustainable development goals.*

A. PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals yang sering disebut SDGs, telah mencapai kemajuan besar di Indonesia sejak diumumkan pada tanggal 25 September 2015, di Markas Besar PBB. Bahkan, SDGs telah menginspirasi lahirnya SDGs Nasional

Indonesia dan SDGs Desa.¹ Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala terkait sosialisasi dan penerimaannya di tengah masyarakat. Sosialisasi belum mencapai masyarakat kebanyakan dan masih terbatas di kalangan aparat pemerintahan dan sebagian sivitas akademika perguruan tinggi. Persepsi masyarakat bahwa SDGs adalah produk asing yang tidak selalu cocok untuk diterapkan di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, karena SDGs didasarkan pada standar moral yang berbeda, terus menjadi penghalang lain terhadap penerimaan SDGs di masyarakat.² Padahal bila diteliti dengan seksama SDGs merupakan sebetulnya etika sosial yang memiliki landasan di dalam berbagai ayat al-Qur'an. Menurut A. Qodri Azizy, etika sosial adalah prinsip-prinsip tingkah laku yang berbentuk aturan, norma atau moral. Prinsip-prinsip tersebut dapat berasal dari adat istiadat atau agama suatu masyarakat.³ Dalam Islam, masalah sosial telah mendapatkan begitu banyak perhatian. Al-Qur'an memberikan banyak pengetahuan dan penjelasan tentang pendidikan etika sosial dengan baik kepada seluruh manusia.⁴

Kajian-kajian yang ada tentang SDGs sebelumnya cenderung melihat beberapa aspek berikut. *Pertama*, kajian-kajian yang melihat SDGs dari aspek ekonomi.⁵ *Kedua*, kajian-kajian yang melihat SDGs dari aspek pendidikan.⁶ *Ketiga*, kajian-kajian yang melihat SDGs dari aspek lingkungan.⁷ *Keempat*, kajian-kajian yang melihat SDGs dari

¹ "SDGs Desa | Sistem Informasi Desa," accessed June 16, 2023, <https://sid.kemendesa.go.id/sdgs>.

² "SDGs Belum Membuahkan Hasil Sesuai Harapan, Ini Alasannya | Republika Online," accessed June 16, 2023, <https://news.republika.co.id/berita/qxh7nx374/sdgs-belum-membuahkan-hasil-sesuai-harapan-ini-alasannya>.

³ A. Qodri Azizy, *Pendidikan (Agama) Untuk Membangun Etika Sosial: Mendidik Anak Sukses Masa Depan: Pandai Dan Bermanfaat* (Semarang: Aneka Ilmu, 2003).

⁴ Abd Aziz, "Pendidikan Etika Sosial Berbasis Argumentasi Quranik," *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 3 (December 29, 2019): 466–89, <https://doi.org/10.36671/andragogi.v1i3.68>.

⁵ Luis Jesús Belmonte-Ureña et al., "Circular Economy, Degrowth and Green Growth as Pathways for Research on Sustainable Development Goals: A Global Analysis and Future Agenda," *Ecological Economics* 185 (July 2021): 107050, <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107050>; Samanthi Silva, "Corporate Contributions to the Sustainable Development Goals: An Empirical Analysis Informed by Legitimacy Theory," *Journal of Cleaner Production* 292 (April 2021): 125962, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.125962>; T.E.T. Dantas et al., "How the Combination of Circular Economy and Industry 4.0 Can Contribute towards Achieving the Sustainable Development Goals," *Sustainable Production and Consumption* 26 (April 2021): 213–27, <https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.10.005>.

⁶ Walter Leal Filho et al., "A Framework for the Implementation of the Sustainable Development Goals in University Programmes," *Journal of Cleaner Production* 299 (May 2021): 126915, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126915>; María Ferrer-Estévez and Ricardo Chalmers, "Integrating Sustainable Development Goals in Educational Institutions," *The International Journal of Management Education* 19, no. 2 (July 2021): 100494, <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2021.100494>; Savo Heleta and Tohiera Bagus, "Sustainable Development Goals and Higher Education: Leaving Many Behind," *Higher Education* 81, no. 1 (January 2021): 163–77, <https://doi.org/10.1007/s10734-020-00573-8>.

⁷ Mateus Torres Nazari et al., "Biofuels and Their Connections with the Sustainable Development Goals: A Bibliometric and Systematic Review," *Environment, Development and Sustainability* 23, no. 8 (August 2021): 11139–56, <https://doi.org/10.1007/s10668-020-01110-4>; Juan Camilo Solarte-Toro and Carlos Ariel Cardona Alzate, "Biorefineries as the Base for Accomplishing the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Transition to Bioeconomy: Technical Aspects, Challenges and Perspectives," *Bioresour. Technology* 340 (November 2021): 125626, <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.125626>; Suraj K. Mallick et al., "Plastic Waste Footprint in the Context of COVID-19: Reduction Challenges and Policy Recommendations towards Sustainable Development Goals," *Science of The Total Environment* 796 (November 2021): 148951, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.148951>.

aspek kesehatan.⁸ Dari beberapa kecenderungan ini, aspek agama masih kurang dikaji. Padahal agama merupakan modal sosial dalam pembangunan masyarakat.⁹ Selain itu, ajaran agama yang bersifat profetik mau tidak mau menjadi dasar isi SDGs. Kekuatan hukum alam dan hukum ekonomi yang memiliki logika kepentingan masing-masing, kemungkinan besar akan dengan cepat mendominasi dan mengkooptasi SDGs jika tidak ada muatan spiritualitas keagamaan.¹⁰

Tulisan ini bertujuan untuk melengkapi kajian-kajian yang ada dengan cara memperlihatkan keterkaitan SDGs dengan agama, dalam hal ini Islam, dan menjelaskan mengapa Agama Islam penting sebagai basis etika sosial bagi SDGs yang berbasis pada al-Qur'an selaku sumber utama ajarannya. Tiga pertanyaan penting ingin dijawab penulis di dalam tulisan ini. *Pertama*, apa yang dimaksud dengan SDGs? *Kedua*, apa yang dimaksud dengan etika sosial qur'anik? *Ketiga*, bagaimana formulasi etika sosial qur'anik bagi SDGs? Tulisan ini juga didasarkan pada argumen bahwa SGSs membutuhkan Agama Islam sebagai basis etika sosial. Basis ini penting untuk memudahkan penerimaan SDGs oleh masyarakat banyak di Indonesia. Basis dimaksud sebagian besarnya dapat ditemukan dalam al-Qur'an selaku sumber utama ajaran Islam.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan bentuk studi kepustakaan. Literatur yang ada mengenai SDGs dicari untuk dijadikan data penelitian. Demikian juga dengan literatur dari media cetak dan internet dimasukkan dalam data penelitian. Teori hermeneutika digunakan untuk menganalisis data penelitian yang dikumpulkan untuk menangkap makna esensial yang sesuai dengan konteks. Dalam hal ini, peneliti melakukan analisis terhadap data untuk memahami esensi maknanya sesuai situasi saat ini.¹¹

⁸ Marni Sommer et al., "How Addressing Menstrual Health and Hygiene May Enable Progress across the Sustainable Development Goals," *Global Health Action* 14, no. 1 (January 1, 2021): 1920315, <https://doi.org/10.1080/16549716.2021.1920315>; Rebecca A Heidkamp et al., "Mobilising Evidence, Data, and Resources to Achieve Global Maternal and Child Undernutrition Targets and the Sustainable Development Goals: An Agenda for Action," *The Lancet* 397, no. 10282 (April 2021): 1400–1418, [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)00568-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00568-7).

⁹ Christopher Candland, "Faith as Social Capital: Religion and Community Development in Southern Asia," in *Social Capital as a Policy Resource*, ed. John D. Montgomery and Alex Inkeles (Boston, MA: Springer US, 2001), 129–48, https://doi.org/10.1007/978-1-4757-6531-1_8; Francis Fukuyama, "Social Capital, Civil Society and Development," *Third World Quarterly* 22, no. 1 (February 2001): 7–20, <https://doi.org/10.1080/713701144>.

¹⁰ M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam Di Era Kontemporer* (IRCISOd, 2022).

¹¹ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 298.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Terkini Jumlah Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran, Kerusakan Hutan dan Penegakan Hukum di Indonesia

Sebagai pengantar di bagian pembahasan ini, penulis akan paparkan beberapa data terkait dengan kondisi terkini tentang penduduk miskin, tingkat pengangguran, kerusakan hutan, dan penegakan hukum di Indonesia. Data-data ini penting sebagai dasar pemahaman dan implementasi SDGs di Indonesia.

Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS, terdapat 26,36 juta penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 atau 9,57 persen dari jumlah penduduk dan 11,98 juta di antaranya atau 7,53 persen tinggal di wilayah perkotaan dan 12,36% penduduk atau 14,38 juta jiwa tinggal di pedesaan.¹² Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Maret 2023 sebesar 5,45% menurut data tingkat pengangguran BPS. 3,60 juta orang atau 1,70 persen penduduk usia kerja, terkena dampak COVID-19. Dari jumlah tersebut, 0,20 juta jiwa menganggur akibat virus, 0,26 juta jiwa Bukan Angkatan Kerja (BAK) akibat virus, 0,07 juta jiwa menganggur akibat virus, dan 3,07 juta jiwa merupakan penduduk bekerja yang mendapatkan pengurangan jam kerja akibat virus ini.¹³ Riset BPS menyebutkan antara tahun 2017 hingga 2021, luas tutupan hutan Indonesia menyusut 956.258 hektar. Jumlah tersebut mewakili 0,5% luas daratan di Indonesia. Sumatra, Papua Nugini, dan Kalimantan kehilangan sebagian lahan hutannya. Meskipun terjadi peningkatan jumlah lahan hutan, namun jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan jumlah luas hutan yang hilang di Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Bali-Nusa Tenggara.¹⁴

Jajak Pendapat Litbang Kompas juga menunjukkan adanya penurunan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum, yang memberikan informasi tentang penegakan hukum di Indonesia. Hanya 51,5% responden survei yang dilakukan antara 24 September hingga 7 Oktober 2022 tersebut

¹² "Persentase Penduduk Miskin September 2022 Naik Menjadi 9,57 Persen," accessed June 10, 2023, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20September,53%20persen%20pada%20September%202022.>

¹³ "Februari 2023: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 5,45 Persen Dan Rata-Rata Upah Buruh Sebesar 2,94 Juta Rupiah per Bulan," accessed June 10, 2023, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/05/05/2001/februari-2023--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-45-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-2-94-juta-rupiah-per-bulan.html>.

¹⁴ "Luas Hutan Indonesia Berkurang Hampir Sejuta Hektare Dalam 5 Tahun," accessed June 10, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/21/luas-hutan-indonesia-berkurang-hampir-sejuta-hektare-dalam-5-tahun>.

menyatakan kepuasannya terhadap kinerja penegakan hukum. Persentase tersebut lebih rendah 6% dibandingkan hasil survei Juni 2022 sebesar 57,5 persen.¹⁵

Data-data di atas memperlihatkan bahwa masih terdapat persoalan besar di Indonesia terkait kondisi penduduk miskin, tingkat pengangguran, kerusakan hutan, dan penegakan hukum. SDGs dan pendahulunya *Millennial Development Goals* (MDGs) adalah tawaran penting bagi perbaikan kondisi ini. Apalagi perkara-perkara yang menjadi pilar atau tujuan SDGs bukanlah merupakan perkara-perkara yang asing dan tidak sesuai apalagi bertentangan dengan peri kehidupan bangsa ini. Oleh karenanya, perlu dilakukan usaha pemberian pemahaman kepada masyarakat yang dapat dimulai dengan pencarian basis etika sosial qur'ani bagi SDGs. Ini penting agar SDGs ini lebih mudah untuk dipahami dan diterima serta dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia.

2. Beberapa Catatan tentang Sustainable Development Goals

Konsep tentang *sustainable development* secara historis muncul pertama kali berkaitan dengan konteks kepedulian terhadap lingkungan. Kepedulian ini dapat dilihat sebagai usaha untuk mendamaikan dua paradigma yang berseberangan, yakni antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan yang efisien bagi sumber daya lingkungan dan alam.¹⁶ Secara teknis, agenda pembangunan global pasca tahun 2015 dikembangkan pada KTT PBB tentang MDGs tahun 2010, sebelum selesainya implementasi MDGs. Konsensus yang dicapai dalam dokumen *The Future We Want* pada Konferensi PBB tentang *Sustainable Development* tahun 2012 memperkuat hal ini. Kedua faktor ini menjadi katalis utama dalam perumusan rencana SDGs 2030, yaitu rencana pembangunan pasca tahun 2015 yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada bulan September 2015.¹⁷

SDGs adalah pembangunan yang menjamin kesejahteraan ekonomi masyarakat tumbuh secara berkelanjutan, melestarikan kehidupan sosial masyarakat, melindungi lingkungan, dan menjamin keadilan dan tata kelola yang dapat menopang peningkatan

¹⁵ "Survei Litbang 'Kompas': Kepuasan Publik Pada Penegakan Hukum Menurun," accessed June 10, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/24/06181351/survei-litbang-kompas-kepuasan-publik-pada-penegakan-hukum-menurun>.

¹⁶ Tomáš Háek, Svatava Janoušková, and Bedřich Moldan, "Sustainable Development Goals: A Need for Relevant Indicators," *Ecological Indicators* 60 (January 2016): 565–73, <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.08.003>.

¹⁷ "Sekilas SDGs," accessed June 10, 2023, <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>.

standar masyarakat. hidup dari generasi ke generasi. 17 SDGs mewakili komitmen nasional dan internasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat: tidak ada kelaparan, tidak ada kemiskinan, kehidupan yang sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas tinggi, kesetaraan gender, akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, energi yang terjangkau dan bersih, lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang terhormat, infrastruktur, inovasi, dan industri; menurunkan kesenjangan; kota dan pemukiman yang berkelanjutan; konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; mengatasi perubahan iklim; ekosistem laut dan darat; perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat; dan kolaborasi untuk mencapai tujuan.¹⁸

Target SDGs mewakili prioritas pembangunan nasional, sehingga memerlukan koordinasi kebijakan perencanaan nasional, provinsi, kabupaten, dan lokal. Target SDGs Nasional selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 melalui program, kegiatan, indikator yang dapat diukur, dan indikasi dukungan keuangan. SDGs merupakan versi perbaikan dari MDGs yang berfokus pada hak asasi manusia, lebih inklusif dengan melibatkan organisasi masyarakat, media, filantropis dan pelaku usaha, serta akademisi dan pakar, dan lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara, baik negara maju maupun berkembang.¹⁹

SDGs secara spesifik telah mempengaruhi pembangunan Indonesia, sehingga menghasilkan SDGs Nasional Indonesia dan SDGs Desa yang memiliki delapan belas tujuan: desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan di desa yang berkualitas, partisipasi perempuan di desa, desa yang layak mendapatkan air bersih dan sanitasi, desa energi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi di desa, infrastruktur dan inovasi di desa sesuai kebutuhan, desa tanpa kesenjangan, desa berwawasan lingkungan dan menghasilkan barang, desa yang sensitif terhadap perubahan iklim, desa yang menjaga lingkungan laut, desa yang peduli terhadap lingkungan darat, desa yang damai dan berkeadilan; kemitraan untuk pembangunan desa, serta institusi desa yang dinamis, dan budaya desa yang fleksibel.²⁰ SDGs Desa ini merupakan usaha terpadu pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan dan hukum sebagai pilar-pilar utama SDGs.

¹⁸ "Sekilas SDGs."

¹⁹ "Sekilas SDGs."

²⁰ "SDGs Desa | Sistem Informasi Desa."

3. Gambaran Sekilas tentang Etika Sosial Qur'anik

Etika sosial merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengatur perilaku etis manusia, yakni suatu aturan sosial yang dijadikan pedoman untuk membuat keputusan.²¹ Etika sosial adalah filsafat atau pemikiran kritis yang logis tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai bagian dari kemanusiaan. Artinya, segala sesuatu yang dilakukan seseorang harus berasal dari hati nuraninya dan mempunyai kewajiban untuk bertindak yang bermanfaat bagi orang lain selain kepentingannya sendiri. Etika sosial mencakup tingkah laku dalam hidup yang berbentuk aturan, norma atau moral, apapun landasannya dalam agama atau adat istiadat dalam suatu masyarakat.²² Etika sosial diterapkan sebagai jembatan antara manusia untuk menjadi masyarakat yang harmonis. Dengan jembatan ini, konsep mereka dan konsep kita akan bersatu atas nama kemanusiaan. Hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat yang akan memandang setiap manusia selaku manusia yang mempunyai hak yang setara dengan dirinya.²³

Islam dapat dibagi menjadi setidaknya dua mazhab utama jika dilihat dari penerapannya di lingkungan pluralistik dan multikultural di Indonesia, yakni mazhab legal-eksklusif dan mazhab substantif-inklusif. Tujuan dari Mazhab Islam eksklusif adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam secara formal di masyarakat dan lembaga negara. Aliran pemikiran ini berpendapat bahwa Islam harus menjadi satu warna dalam dunia hitam putih Indonesia yang multikultural dan pluralistik. Sebaliknya, aliran pemikiran substantif-inklusif lebih berfokus pada realitas sosiokultural masyarakat di mana Islam berakar. Islam tidak harus menjadi sekte negara atau ditafsirkan secara formal dalam konteks Indonesia. Sebaliknya, Islam perlu mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan nilai-nilai budaya dan kearifan masyarakat setempat. Islam perlu dipromosikan sebagai etika sosial.²⁴ Dalam hal ini, Islam akan memerintahkan masyarakat untuk memperlakukan satu sama lain dengan baik demi terciptanya masyarakat yang adil dan damai.²⁵

²¹ Richard Devon, "Design Ethics: The Social Ethics Paradigm," n.d.

²² Azizy, *Pendidikan (Agama) Untuk Membangun Etika Sosial: Mendidik Anak Sukses Masa Depan: Pandai Dan Bermanfaat*.

²³ Andit Triono, "Membumikan Etika Sosial dan Pemahaman Multikultural Umat Beragama Melalui Pendidikan Tinggi," n.d.

²⁴ M Nur Fauzi, "Konvergensi Pemikiran Etika Sosial Gus Dur dan Etika Utilitarianisme," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (November 25, 2019): 110–29, <https://doi.org/10.36420/ju.v5i2.3648>.

²⁵ Tobroni and En Asyraf Isyraqi, "Peranan Pendidikan Agama dalam Pembentukan Etika Sosial Persaudaraan dan Perdamaian (Studi di Malaysia dan Indonesia)," *Progresiva: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 5, no. 1 (November 6, 2014), <https://doi.org/10.22219/progresiva.v5i1.2053>.

Inilah etika sosial qur'anik yang penulis maksudkan dalam tulisan ini, yakni etika sosial yang diwarnai atau diderivasi dari ajaran Islam di mana al-Qur'an selaku sumber utamanya, dalam studi etika serupa dengan derivasi Teori Perintah Tuhan ke Teori Hukum Kodrat.²⁶ Teori Perintah Tuhan yang awalnya bersifat eksklusif bagi penganut agama tertentu saja diderivasi agar menjadi bersifat inklusif dalam bentuk Teori Hukum Kodrat sehingga dapat diterima oleh semua orang. Dalam hal ini, etika sosial qur'anik bersumber dan didasarkan pada al-Qur'an yang tidak hanya meliputi petunjuk pola hubungan antara manusia dan Tuhan, namun juga mengatur pola hubungan manusia dengan sesamanya, bahkan alam semesta. Selanjutnya, berdasarkan paparan ini, penulis akan berupaya melakukan formulasi atas etika sosial yang ada dalam SDGs agar memiliki berbagai dasar ajaran Islam yang kesemuanya bersumber dari al-Qur'an.

4. Formulasi Etika Sosial Qur'anik di dalam Pilar-pilar *Sustainable Development Goals*

17 tujuan dan 169 target SDGs disusun menjadi empat pilar, yakni pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, dan pembangunan hukum untuk mempermudah implementasi dan pemantauannya.²⁷ Dalam penelitian ini penulis juga akan menguraikan lebih jauh mengenai pilar-pilar ini sebagai berikut.

a. Pilar Pembangunan Sosial

Tercapainya pemenuhan hak asasi manusia yang berkualitas secara adil dan setara merupakan landasan SDGs dan akan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Tujuan pilar pembangunan sosial meliputi kesetaraan gender, kehidupan yang sehat dan sejahtera, pengentasan kelaparan dan kemiskinan, serta pendidikan berkualitas tinggi.

Islam secara tradisional menekankan pilar-pilar pembangunan sosial dan beragam tujuan yang ada di dalamnya. Misalnya, Islam memandang kemiskinan sebagai penyakit sosial yang perlu disembuhkan melalui inisiatif untuk menguranginya dan memberikan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat miskin. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk memberikan kemampuan

²⁶ M. Ied Al Munir, "Derivasi Nilai-Nilai Moral Dalam Tradisi Cuci Kampung" (The First International Conference on Jambi Studies, Jambi: ICJS, 2013), 165–86.

²⁷ "Sekilas SDGs."

kepada masyarakat miskin dan kelompok lemah lainnya untuk menentukan pilihan dan memutuskan langkah-langkah apa yang akan mereka ambil untuk memperbaiki kehidupan mereka. Karena kemiskinan bukan semata-mata merupakan keadaan alamiah melainkan merupakan produk dari banyak faktor yang berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan, maka pemberdayaan juga mencakup seluruh upaya untuk melepaskan individu-individu miskin dari rantai kemiskinan yang berujung pada tertutupnya peluang ekonomi bagi mereka. Oleh karena itu, kedua faktor ini harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan.²⁸ Terkait dengan persoalan ini Al-Qur'an telah menyinggunginya dalam Surah Al-Maa-idah Ayat 2:

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Islam juga memberikan kesetaraan status antara perempuan dan laki-laki. Gagasan egalitarianisme, kesetaraan laki-laki dan perempuan serta bangsa, suku, dan keturunan, adalah salah satu konsep inti dan prinsip keyakinan Islam.²⁹ Dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah dan hamba, laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama. Tidak ada satu ayat pun dalam al-Qur'an atau hadis yang melarang perempuan berpartisipasi dalam posisi sosial dalam masyarakat. Namun al-Qur'an dan hadis juga menunjukkan bahwa perempuan mampu aktif menekuni berbagai karir. Landasan keadilan dan kesetaraan gender adalah gagasan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama setara sebagai hamba Tuhan.³⁰ Dalam al-Qur'an Surah al-Hujuraat Ayat 13 disebutkan:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu...”

Ayat ini menjadi contoh bagaimana laki-laki dan perempuan setara dalam hal ibadah dan interaksi sosial. Gagasan bahwa ada perbedaan di antara keduanya yang

²⁸ Dede Rodin, “Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif al-Qur'an,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (May 31, 2015): 71–102, <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.787>.

²⁹ Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam,” . . . Volume. 13 (2013).

³⁰ Meiliarni Rusli, “Konsep Gender dalam Islam,” *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 1, no. 2 (July 12, 2011): 151, <https://doi.org/10.15548/jk.v1i2.75>.

membuat salah satunya menjadi kurang penting juga ditolak oleh ayat ini. Ibadah merupakan salah satu area dimana persamaan ini dapat dilihat. Terlepas dari jenis kelaminnya, mereka yang tekun beribadah akan mendapat keberkahan yang lebih besar. Derajat nilai ketaqwaan dan pengabdian kepada Allah SWT menjadi penyebab perbedaan tersebut. Ayat ini juga menyoroti fakta bahwa tujuan utama diturunkannya al-Qur'an adalah untuk membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan dan diskriminasi, termasuk prasangka berdasarkan jenis kelamin, ras, suku, dan keturunan lainnya. Gagasan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terdapat dalam Al-Qur'an, namun pada kenyataannya gagasan tersebut sering kali diabaikan.³¹

Islam berpandangan bahwa manusia terdiri dari dua potensi yang perlu diwujudkan: spiritual yang merupakan pengendali tubuh, dan potensi lahiriah yang merupakan tubuh. Tentu saja kedua potensi tersebut harus menjadi pertimbangan pembangunan manusia dalam Islam. Jika dianggap bahwa tujuan pertumbuhan manusia di Indonesia adalah untuk menyempurnakan kemanusiaan, maka tujuan tersebut perlu mempertimbangkan dua potensi yang dimiliki setiap manusia.³² Terkaitnya tingginya derajat manusia yang telah terbangun potensi dirinya al-Qur'an menyebutkannya dalam Surah al-Mujaadilah Ayat 11 sebagai berikut:

“... Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat ...”

b. Pilar Pembangunan Ekonomi

Mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui lapangan kerja dan peluang usaha yang berkelanjutan merupakan pilar pembangunan ekonomi SDGs. Pilar pembangunan ekonomi ini mencakup sejumlah tujuan, termasuk berikut ini: penurunan kesenjangan, industri, inovasi dan infrastruktur, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, energi bersih dan murah, serta kemitraan untuk mencapai tujuan.

Islam telah lama membahas berbagai tujuan pilar pembangunan ekonomi. Keseimbangan ekonomi dalam masyarakat ditekankan oleh sistem ekonomi Islam.

³¹ Suhra, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam.”

³² Warul Walidin, “Arah Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam Dimensi Pendidikan Islam,” *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling* 2, no. 2 (December 2, 2016): 147, <https://doi.org/10.22373/je.v2i2.813>.

Selain bergantung pada kekuatan pasar, mekanisme distribusi kekayaan yang dikontrol secara khusus juga berperan dalam membangun keseimbangan perekonomian. Distribusi kekayaan masyarakat ini diatur oleh mekanisme distribusi dan didasarkan pada prinsip distribusi. Islam, secara teori, melarang distribusi pendapatan yang tidak adil namun tidak menuntut kesetaraan dalam kepemilikan kekayaan. Hal ini karena Islam menekankan bahwa semua warga negara harus meningkatkan perekonomiannya dengan memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya, memahami manusia sebagai manusia yang kebutuhan esensialnya harus dipenuhi secara keseluruhan. Islam memandang manusia sebagai sesama manusia yang untuk menegakkan keadilan sosial harus saling membantu dan meningkatkan kesejahteraan bersama, meskipun Islam memberikan kebebasan untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya.³³ Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk menggunakan kekayaannya untuk memberi makan orang yang lapar dan miskin. Al-Qur'an menyatakan bahwa dalam setiap harta ada hak untuk orang miskin seperti termaktub dalam Surah ad-Dzaariyaat Ayat 19 berikut ini:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Islam, agama yang mengatur kehidupan, membantu dan membimbing orang dalam pengelolaan sumber daya keuangan untuk mencapai keuntungan dalam kehidupan ini dan juga di akhirat.³⁴ Islam muncul sebagai agama terakhir yang menjanjikan kepuasan hidup semaksimal mungkin bagi para pengikutnya. Oleh karena itu, Islam mempunyai kepedulian yang besar terhadap kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain, Islam sangat menghendaki manusia memperoleh kekayaan materi dan spiritual.³⁵ Islam memandang keadilan sosial sebagai komponen penting dalam dinamika masyarakat, oleh karena itu Islam berangkat dari perspektif yang seimbang antara dunia ini dan akhirat. Sebaliknya,

³³ Fahrur Ulum, “Konstruksi Sistem Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan yang Merata,” *TSAQAFAH* 11, no. 1 (November 30, 2015): 113, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v11i1.256>.

³⁴ Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi,” *JURNAL HUKUM ISLAM*, February 10, 2017, 73–96, <https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.693>.

³⁵ Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan dalam Islam” 3, no. 2 (2015).

mereka percaya bahwa keadilan sosial dapat ditegakkan melalui kemakmuran ekonomi.³⁶

Al-Qur'an memberikan cara untuk mengubah kesenjangan rezeki menjadi sumber kebajikan dan kedamaian. Sejumlah ayat dalam Al-Qur'an mendorong masyarakat untuk bekerja sama memberdayakan komunitas mereka dan mengentaskan kemiskinan. Karena program pemberdayaan masyarakat merangsang perbaikan diri dan mengajarkan kemandirian, program ini merupakan alat yang berguna untuk mengurangi kemiskinan. Islam menganjurkan umatnya untuk saling membantu dalam amal shaleh. Program pengembangan masyarakat ini selaras dengan prinsip Islam dan pemeluknya untuk menjadi agama yang *rahmatan lil 'alamin*. Tujuan Islam adalah agar pemeluknya bertindak sebagai pembawa pesan kebaikan Tuhan ke seluruh dunia.³⁷ Terkait dengan persoalan ini al-Qur'an, misalnya, telah menyingungnya dalam Surah al-Jumu'ah Ayat 10 dan Surah ar-Ra'd Ayat 11 sebagai berikut:

“Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

“... Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ...”

c. Pilar Pembangunan Lingkungan

Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk menunjang seluruh kehidupan merupakan pilar pembangunan lingkungan hidup SDGs. Pilar pembangunan lingkungan ini mencakup sejumlah tujuan, termasuk pengelolaan perubahan iklim, kota dan komunitas yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, air bersih dan sanitasi yang layak, serta ekosistem laut dan darat.

Prinsip-prinsip pembangunan lingkungan dan beragam tujuannya telah dimasukkan ke dalam doktrin Islam. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ketika masyarakat memahami tantangan lingkungan hidup, salah satu elemen dasar yang terkadang terabaikan adalah komponen spiritual atau agama. Agama bukanlah

³⁶ P Pardomuan Siregar, “Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Bisnis Net* 1, no. 1 (2018).

³⁷ Ulfi Putra Sany, “Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an,” *Jurnal Ilmu Dakwah* 39, no. 1 (October 24, 2019): 32, <https://doi.org/10.21580/jid.v39.1.3989>.

kerangka acuan yang memadai untuk isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan. Seyyed Hossein Nasr menegaskan bahwa agama sebenarnya memainkan peran penting dalam membantu penyelesaian masalah lingkungan yang mendesak ini. Nasr melihat alam sebagai representasi Tuhan. Pemahaman terhadap simbol ini akan mengungkapkan kebaikan dan kehadiran Tuhan. Menurut Chapman, semua agama besar, Islam, Kristen, Yudaisme, Hinduisme, Budha, Taoisme, dan sebagainya, telah mempromosikan kearifan lingkungan.³⁸ Misalnya, Islam telah menyatakan bahwa manusialah pihak paling bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan lingkungan, serta pihak yang paling bertanggung jawab untuk memperbaikinya, seperti disebutkan dalam Surah al-Ruum Ayat 41 berikut:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Para ahli tafsir klasik umumnya menganggap kata fasad dalam ayat ini terbatas pada kerusakan sosial dan kerusakan spiritual. Ibnu Katsir, misalnya, membaca fasad pada ayat di atas sebagai kemusyrikan, pembunuhan, kemaksiatan, dan segala pelanggaran lainnya terhadap Allah. Namun, ahli tafsir kontemporer, seperti Yusuf al-Qardawi, melihat fasad sebagai krisis lingkungan fisik yang mengarah pada sejumlah bencana, termasuk penyebaran penyakit, krisis pangan, krisis yang melibatkan sumber daya alam, perubahan musim, dan pencemaran lingkungan yang berdampak buruk pada lingkungan yang membahayakan semua makhluk hidup. Ayat ini menyatakan bahwa tindakan manusia yang mengabaikan kelestarian lingkungan hiduplah yang menyebabkan bencana dan kehancuran lingkungan. Selain itu, krisis mental manusia juga berkontribusi terhadap bencana lingkungan.³⁹

d. Pilar Pembangunan Hukum

Dalam rangka mewujudkan keamanan, stabilitas, dan supremasi hukum, pilar hukum dan tata kelola SDGs adalah terwujudnya kepastian hukum dan

³⁸ Dede Rodin, “Alquran dan Konservasi Lingkungan: Telaah Ayat-Ayat Ekologis,” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 2 (November 21, 2017): 391, <https://doi.org/10.21154/altahrir.v17i2.1035>.

³⁹ Rodin.

pemerintahan yang efisien, bertanggung jawab, transparan, dan partisipatif. Tujuan pilar hukum dan tata kelola adalah sebagai berikut: keadilan, perdamaian, dan kelembagaan yang kuat. Islam sangat menekankan pilar-pilar pembangunan hukum dan berbagai tujuannya, khususnya hubungan antara keadilan dan penegakan hukum

Islam mewajibkan pemeluknya untuk memperlakukan semua orang secara setara dan tanpa bias. Penting untuk mengatakan apa yang perlu dikatakan, meskipun itu berarti menyakiti anggota keluarga sendiri. Umat Islam diperintahkan untuk bersikap adil terhadap non-muslim, dan persyaratan untuk bertindak adil ini juga harus ditegakkan dalam keluarga dan komunitas Muslim.⁴⁰

Jika sistem hukum didasarkan pada gagasan keadilan, maka diperlukan tindakan pemerintah yang mungkin mencakup penegakan hukum. Penyelenggara negara mempunyai banyak tanggung jawab utama dalam menjaga supremasi hukum. *Pertama*, kewajiban menggunakan kewenangan pemerintahan secara adil, jujur, dan bijaksana. Pemenuhan keadilan yang dihasilkan dari kekuasaan negara harus dapat dinikmati oleh semua orang tanpa kecuali. Ambil contoh pelaksanaan otoritas negara di bidang politik dan pemerintahan. Setiap orang harus diperbolehkan untuk menikmati hak-haknya secara setara dan tanpa diskriminasi. *Kedua*, kewajiban menjalankan kewenangan kehakiman secara adil. Hukum perlu diterapkan secara tepat, karena hukum memberikan dampak yang sama kepada semua orang, tanpa memandang status. *Ketiga*, tugas penyelenggara negara untuk memenuhi tujuan kesejahteraan sosial dan masyarakat berkeadilan.⁴¹ Terkait dengan persoalan penegakan hukum ini al-Qur'an pernah menyinggunginya dalam Surah an-Nisaa' Ayat 58 berikut:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

⁴⁰ Mahir Amin, “Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam,” *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (October 1, 2015): 322–43, <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>.

⁴¹ Abnan Pancasilawati, “Penegakan Hukum dalam Syari'at Islam,” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 1 (2013): 37–46.

Islam membawa panji keadilan yang lama kelamaan dianut oleh seluruh masyarakat, termasuk perlunya keadilan dalam sistem peradilan pidana dalam rangka tegaknya negara hukum. Islam sangat menjunjung tinggi keadilan, baik pribadi maupun sosial, dalam penerapan hukuman.⁴²

Tidak dapat disangkal bahwa al-Qur'an meningkatkan keadilan hidup manusia baik secara kolektif maupun individu. Umat Islam sangat mudah untuk merasa puas diri dengan kesimpulan nyata yang telah diambil. Teori-teori terkuat tentang keadilan muncul dari nilai-nilai al-Qur'an sebagai akibat dari sikap berpuas diri yang terus-menerus. Pemahaman seperti ini sesuai dengan ajaran keimanan pribadi seseorang mengenai Tuhan sebagai Tuhan Yang Maha Adil. Bukankah al-Qur'an yang merupakan risalah Allah seharusnya menjadi sumber pemikiran tentang keadilan, karena Allah adalah sumber keadilan itu sendiri?⁴³ Seperti termaktub dalam al-Qur'an Surah al-Maa-idah Ayat 8 berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

D. SIMPULAN

Karena SDGs mungkin diatur oleh kekuatan penegakan hukum alam dan aturan ekonomi tanpa adanya nilai-nilai spiritual agama, maka agama memainkan peran penting dalam memberikan landasan etika sosial untuk mencapai tujuan-tujuan SDGs dimaksud. Bagi peneliti, sama sekali tidak ada konflik antara keyakinan agama Islam dengan pilar-pilar SDGs. Islam bisa menjadi landasan etika sosial SDGs. Dalam hal ini, isu-isu sosial seperti pentingnya membantu sesama manusia dibahas secara luas dalam al-Qur'an, yang merupakan sumber utama hukum Islam. Al-Qur'an mencermati pula pentingnya kepedulian kepada orang-orang miskin dan usaha untuk pemberdayaan mereka. Al-Qur'an juga memberi tanggung jawab yang besar pada manusia untuk menjaga lingkungannya. Selain itu, al-Qur'an juga menyoroti pentingnya keadilan dan penegakan hukum yang tidak pandang bulu.

⁴² Pancasilawati.

⁴³ Amin, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam."

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. *Falsafah Kalam Di Era Kontemporer*. IRCiSoD, 2022.
- Al Munir, M. Ied. “Derivasi Nilai-Nilai Moral Dalam Tradisi Cuci Kampung,” 165–86. Jambi: ICJS, 2013.
- Amin, Mahir. “Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam.” *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (October 1, 2015): 322–43. <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. “Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi.” *JURNAL HUKUM ISLAM*, February 10, 2017, 73–96. <https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.693>.
- Aziz, Abd. “Pendidikan Etika Sosial Berbasis Argumentasi Quranik.” *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 3 (December 29, 2019): 466–89. <https://doi.org/10.36671/andragogi.v1i3.68>.
- Azizy, A. Qodri. *Pendidikan (Agama) Untuk Membangun Etika Sosial: Mendidik Anak Sukses Masa Depan: Pandai Dan Bermanfat*. Semarang: Aneka Ilmu, 2003.
- Belmonte-Ureña, Luis Jesús, José Antonio Plaza-Úbeda, Diego Vazquez-Brust, and Natalia Yakovleva. “Circular Economy, Degrowth and Green Growth as Pathways for Research on Sustainable Development Goals: A Global Analysis and Future Agenda.” *Ecological Economics* 185 (July 2021): 107050. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107050>.
- Candland, Christopher. “Faith as Social Capital: Religion and Community Development in Southern Asia.” In *Social Capital as a Policy Resource*, edited by John D. Montgomery and Alex Inkeles, 129–48. Boston, MA: Springer US, 2001. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-6531-1_8.
- Dantas, T.E.T., E.D. de-Souza, I.R. Destro, G. Hammes, C.M.T. Rodriguez, and S.R. Soares. “How the Combination of Circular Economy and Industry 4.0 Can Contribute towards Achieving the Sustainable Development Goals.” *Sustainable Production and Consumption* 26 (April 2021): 213–27. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.10.005>.
- Devon, Richard. “Design Ethics: The Social Ethics Paradigm,” n.d.
- Fauzi, M Nur. “Konvergensi Pemikiran Etika Sosial Gus Dur dan Etika Utilitarianisme.” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (November 25, 2019): 110–29. <https://doi.org/10.36420/ju.v5i2.3648>.

- “Februari 2023: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 5,45 Persen Dan Rata-Rata Upah Buruh Sebesar 2,94 Juta Rupiah per Bulan.” Accessed June 10, 2023. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/05/05/2001/februari-2023--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-45-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-2-94-juta-rupiah-per-bulan.html>.
- Ferrer-Estévez, María, and Ricardo Chalmeta. “Integrating Sustainable Development Goals in Educational Institutions.” *The International Journal of Management Education* 19, no. 2 (July 2021): 100494. <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2021.100494>.
- Fukuyama, Francis. “Social Capital, Civil Society and Development.” *Third World Quarterly* 22, no. 1 (February 2001): 7–20. <https://doi.org/10.1080/713701144>.
- Hák, Tomáš, Svatava Janoušková, and Bedřich Moldan. “Sustainable Development Goals: A Need for Relevant Indicators.” *Ecological Indicators* 60 (January 2016): 565–73. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.08.003>.
- Heidkamp, Rebecca A, Ellen Piwoz, Stuart Gillespie, Emily C Keats, Mary R D’Alimonte, Purnima Menon, Jai K Das, et al. “Mobilising Evidence, Data, and Resources to Achieve Global Maternal and Child Undernutrition Targets and the Sustainable Development Goals: An Agenda for Action.” *The Lancet* 397, no. 10282 (April 2021): 1400–1418. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)00568-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00568-7).
- Heleta, Savo, and Tohiera Bagus. “Sustainable Development Goals and Higher Education: Leaving Many Behind.” *Higher Education* 81, no. 1 (January 2021): 163–77. <https://doi.org/10.1007/s10734-020-00573-8>.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Leal Filho, Walter, Fernanda Frankenberger, Amanda Lange Salvia, Ulisses Azeiteiro, Fatima Alves, Paula Castro, Markus Will, et al. “A Framework for the Implementation of the Sustainable Development Goals in University Programmes.” *Journal of Cleaner Production* 299 (May 2021): 126915. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126915>.
- “Luas Hutan Indonesia Berkurang Hampir Sejuta Hektare Dalam 5 Tahun.” Accessed June 10, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/21/luas-hutan-indonesia-berkurang-hampir-sejuta-hektare-dalam-5-tahun>.

- Mallick, Suraj K., Malay Pramanik, Biswajit Maity, Pritiranjana Das, and Mehebab Sahana. "Plastic Waste Footprint in the Context of COVID-19: Reduction Challenges and Policy Recommendations towards Sustainable Development Goals." *Science of The Total Environment* 796 (November 2021): 148951. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.148951>.
- Nazari, Mateus Torres, Janaína Mazutti, Luana Girardi Basso, Luciane Maria Colla, and Luciana Brandli. "Biofuels and Their Connections with the Sustainable Development Goals: A Bibliometric and Systematic Review." *Environment, Development and Sustainability* 23, no. 8 (August 2021): 11139–56. <https://doi.org/10.1007/s10668-020-01110-4>.
- Pancasilawati, Abnan. "Penegakan Hukum dalam Syari'at Islam." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 1 (2013): 37–46.
- "Persentase Penduduk Miskin September 2022 Naik Menjadi 9,57 Persen." Accessed June 10, 2023. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20September,5%20persen%20pada%20September%202022>.
- Rodin, Dede. "Alquran dan Konservasi Lingkungan: Telaah Ayat-Ayat Ekologis." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 2 (November 21, 2017): 391. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v17i2.1035>.
- . "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif al-Qur'an." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (May 31, 2015): 71–102. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.787>.
- Rusli, Meiliarni. "Konsep Gender dalam Islam." *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 1, no. 2 (July 12, 2011): 151. <https://doi.org/10.15548/jk.v1i2.75>.
- Sany, Ulfi Putra. "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an." *Jurnal Ilmu Dakwah* 39, no. 1 (October 24, 2019): 32. <https://doi.org/10.21580/jid.v39.1.3989>.
- "SDGs Belum Membuahkan Hasil Sesuai Harapan, Ini Alasannya | Republika Online." Accessed June 16, 2023. <https://news.republika.co.id/berita/qxh7nx374/sdgs-belum-membuahkan-hasil-sesuai-harapan-ini-alasannya>.

- “SDGs Desa | Sistem Informasi Desa.” Accessed June 16, 2023. <https://sid.kemendesa.go.id/sdgs>.
- “Sekilas SDGs.” Accessed June 10, 2023. <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>.
- Silva, Samanthi. “Corporate Contributions to the Sustainable Development Goals: An Empirical Analysis Informed by Legitimacy Theory.” *Journal of Cleaner Production* 292 (April 2021): 125962. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.125962>.
- Siregar, P Pardomuan. “Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Bisnis Net* 1, no. 1 (2018).
- Sodiq, Amirus. “Konsep Kesejahteraan dalam Islam” 3, no. 2 (2015).
- Solarte-Toro, Juan Camilo, and Carlos Ariel Cardona Alzate. “Biorefineries as the Base for Accomplishing the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Transition to Bioeconomy: Technical Aspects, Challenges and Perspectives.” *Bioresource Technology* 340 (November 2021): 125626. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.125626>.
- Sommer, Marni, Belen Torondel, Julie Hennegan, Penelope A. Phillips-Howard, Thérèse Mahon, Albert Motivans, Garazi Zulaika, et al. “How Addressing Menstrual Health and Hygiene May Enable Progress across the Sustainable Development Goals.” *Global Health Action* 14, no. 1 (January 1, 2021): 1920315. <https://doi.org/10.1080/16549716.2021.1920315>.
- Suhra, Sarifa. “Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur’an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam.” . . *Volume*. 13 (2013).
- “Survei Litbang ‘Kompas’: Kepuasan Publik Pada Penegakan Hukum Menurun.” Accessed June 10, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/24/06181351/survei-litbang-kompas-kepuasan-publik-pada-penegakan-hukum-menurun>.
- Tobroni, and En Asyraf Isyraqi. “Peranan Pendidikan Agama dalam Pembentukan Etika Sosial Persaudaraan dan Perdamaian (Studi di Malaysia dan Indonesia).” *Progresiva : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 5, no. 1 (November 6, 2014). <https://doi.org/10.22219/progresiva.v5i1.2053>.
- Triono, Andit. “Membumikan Etika Sosial dan Pemahaman Multikultural Umat Beragama Melalui Pendidikan Tinggi,” n.d.

Ulum, Fahrur. "Konstruksi Sistem Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan yang Merata." *TSAQAFAH* 11, no. 1 (November 30, 2015): 113. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v11i1.256>.

Walidin, Warul. "Arah Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam Dimensi Pendidikan Islam." *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling* 2, no. 2 (December 2, 2016): 147. <https://doi.org/10.22373/je.v2i2.813>.